

**EFEKTIVITAS PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
BANGKILING KECAMATAN BANUA LAWAS KABUPATEN TABALONG****Siti Aisyah¹, Muhamad Arsyad², Herry Febriadi³**

Program Studi Administrasi Publik

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai

e-mail: ginayunna.aisyah@gmail.com**ABSTRAK**

Pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan di suatu desa merupakan upaya pemerintah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan dengan memanfaatkan potensi yang ada untuk mengurangi angka kemiskinan. Permasalahan yang sering terjadi adalah belum maksimalnya tindak lanjut pasca-pelatihan, sebagian peserta tidak memahami materi, serta usaha yang dirintis tidak tahan lama dan sulit berkembang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas program pemberdayaan masyarakat di Desa Bangkiling, Kecamatan Banua Lawas, Kabupaten Tabalong, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data diambil dengan teknik *purposive sampling* yang melibatkan 13 orang informan. Analisis data dilakukan melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Uji kredibilitas data dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi, analisis kasus negatif, penggunaan bahan referensi, dan *member check*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pemberdayaan masyarakat di Desa Bangkiling belum efektif. Hal ini dilihat dari lima sub-variabel: *Pertama*, pemahaman program, di mana indikator sosialisasi belum efektif karena tidak pernah dilaksanakan, dan indikator pemahaman materi belum efektif karena peserta kurang memahami pembelajaran, meskipun indikator pemahaman tujuan sudah efektif. *Kedua*, tepat sasaran, di mana indikator kesesuaian program dan objek pemberdayaan sudah efektif. *Ketiga*, tepat waktu, di mana indikator pelaksanaan sudah efektif, namun indikator penyelesaian belum efektif karena waktu yang tersedia kurang maksimal untuk menyerap ilmu. *Keempat*, tercapainya tujuan, di mana indikator pencapaian tujuan dan keberlanjutan pelatihan belum efektif karena minimnya usaha berkelanjutan. *Kelima*, perubahan nyata, di mana indikator adanya perubahan dalam membantu ekonomi peserta dan peningkatan kesejahteraan belum efektif. Faktor-faktor yang mempengaruhi terbagi dua. Faktor pendukung adalah adanya dana yang dianggarkan untuk melaksanakan pelatihan. Adapun faktor penghambat adalah kurangnya motivasi dalam diri peserta pelatihan dan tidak adanya modal untuk memulai serta mengembangkan usaha. Disarankan kepada pemerintah desa agar melakukan sosialisasi program, merencanakan waktu penyelesaian secara optimal, menyediakan akses terhadap bahan atau alat pasca-pelatihan, membangun sistem pendampingan dan monitoring, serta menjalin kemitraan untuk akses pasar. Peserta pelatihan diharapkan lebih tekun dan aktif memberikan timbal balik. Diperlukan pula pemantauan dari berbagai pihak untuk menciptakan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.

Kata Kunci: Efektivitas, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa.**ABSTRACT**

Community empowerment through training programs in villages represents a government initiative aimed at improving welfare by utilizing existing potential to reduce poverty rates. Common problems that frequently occur include inadequate post-training follow-up, participants' limited understanding of materials, and initiated businesses that are not sustainable and difficult to develop. This research aims to determine the effectiveness of community empowerment programs in Bangkiling Village, Banua Lawas Sub-district, Tabalong Regency, as well as the factors that influence it. This study employs a descriptive qualitative method. Data collection techniques were conducted through observation, interviews, and documentation. Data sources were obtained using purposive sampling technique involving 13 informants. Data analysis was performed through stages of data collection, data reduction, data presentation, and conclusion drawing. Data credibility testing was conducted through prolonged engagement, increased persistence, triangulation, negative case analysis, use of reference materials, and member checking. The research results indicate that the community empowerment program in Bangkiling Village has not been effective. This is evident from five sub-variables: First, program understanding, where socialization indicators were ineffective as they were never implemented, and material understanding indicators were ineffective because participants poorly understood the learning process, although understanding of objectives was effective. Second, appropriate targeting, where program

suitability indicators and empowerment objects were effective. Third, timeliness, where implementation indicators were effective, but completion indicators were ineffective due to insufficient time available for optimal knowledge absorption. Fourth, goal achievement, where goal attainment indicators and training sustainability were ineffective due to minimal sustainable business efforts. Fifth, tangible changes, where indicators of changes in helping participants' economy and welfare improvement were ineffective. Influencing factors are divided into two categories. The supporting factor is the availability of allocated funds for training implementation. Meanwhile, the inhibiting factors are lack of motivation among training participants and absence of capital to start and develop businesses. It is recommended that the village government conduct program socialization, optimally plan completion schedules, provide access to materials or tools post-training, establish mentoring and monitoring systems, and build partnerships for market access. Training participants are expected to be more diligent and actively provide feedback. Monitoring from various parties is also required to create transparent, accountable, and participative governance.

Keywords: *Effectiveness, Community Empowerment Program*

PENDAHULUAN

Pembangunan Indonesia dimulai dari tingkat paling dasar, yaitu pembangunan desa, yang merupakan strategi pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mengembangkan potensi desa melalui perbaikan infrastruktur fisik dan non-fisik. Pembangunan desa yang dilakukan secara rutin setiap tahun melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan melalui forum musyawarah desa. Dalam forum ini, pemerintah daerah akan mengkaji kebutuhan dan aspirasi masyarakat desa untuk menentukan prioritas pembangunan. Perencanaan pembangunan desa merupakan suatu proses yang sistematis untuk memajukan desa dan masyarakatnya, yang harus direncanakan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi desa. Perencanaan yang efektif akan menghasilkan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Hasil dari perencanaan ini kemudian dituangkan dalam RKPDDes (Rencana Kerja Pemerintah Desa) yang disahkan dan dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan desa.

Upaya pemerintah dalam mengurangi tingkat kemiskinan sejak Maret 2019 dapat dikatakan mengalami kemajuan yang lambat, dan pencapaian yang ada sebagian besar bergantung pada bantuan sosial yang besar. Namun, kebijakan ini seharusnya lebih fokus pada dua aspek utama, yaitu penciptaan lapangan kerja yang berkualitas dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Meskipun pertumbuhan penduduk yang terus meningkat setiap tahunnya merupakan tantangan, masalah kemiskinan di Indonesia tidak hanya disebabkan oleh faktor ini, tetapi juga oleh kebijakan pemerintah dan langkah-langkah yang diambil. Dengan pengelolaan yang efektif, penduduk dapat menjadi aset pembangunan yang berharga untuk pertumbuhan ekonomi. Dapat disimpulkan bahwa pemerintah berupaya memberdayakan sumber daya manusia di desa-desa untuk meningkatkan kemandirian dan pendapatan masyarakat, sehingga kualitas hidup mereka dapat meningkat.

Program pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi, teknologi, kesehatan, dan pendidikan merupakan suatu upaya yang sistematis untuk meningkatkan kemampuan dan potensi masyarakat. Di bidang ekonomi, program ini mencakup kegiatan pelatihan untuk masyarakat yang dibiayai oleh dana desa, yaitu dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa. Dana desa ini kemudian ditransfer melalui anggaran belanja daerah kabupaten, dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Tujuan utama dari penggunaan dana desa ini adalah untuk mengetaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, penggunaan dana desa dibagi menjadi dua kategori, yaitu 30% untuk pemerintahan desa dan 70%

untuk pemberdayaan masyarakat dan pembangunan. Dengan demikian, kegiatan pelatihan yang ada pada program pemberdayaan masyarakat memungkinkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya atau potensi lokal yang ada di desa untuk dijadikan usaha yang dapat membantu perekonomian masyarakat. Hal ini secara tidak langsung dapat mengurangi angka kemiskinan di Indonesia, karena masyarakat desa dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan mereka melalui usaha-usaha yang dikembangkan berdasarkan potensi lokal.

Pendapatan masyarakat secara luas dikecamatan Banua Lawas hanya mengandalkan usaha dibidang pertanian untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga salah satunya Desa Bangkiling hal ini dikarenakan tanah agraris di desa lebih cocok sebagai lahan pertanian dan perkebunan, pertanian didesa pun hanya bergantung pada musim, oleh karena itu pemerintah mulai berusaha unuk menambah kepada sektor lain seperti usaha diluar pertanian supaya peningkatan ekonomi.

Pelatihan masyarakat pada program pemberdayaan masyarakat biasanya diselenggarakan dengan dua pendekatan utama, yaitu pendekatan berbasis masyarakat dan pendekatan berbasis kompetensi. Pendekatan berbasis masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kemampuan setiap kelompok masyarakat atau individu dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Pendekatan ini mencakup aspek pengetahuan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri berdasarkan kekhasan sosial, budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat serta sumber daya alam setempat. Dengan demikian, pelatihan berbasis masyarakat dapat membantu masyarakat untuk memahami dan mengembangkan potensi lokal mereka, sehingga mereka dapat meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan mereka. Di sisi lain, pelatihan berbasis kompetensi menitikberatkan pada penguasaan kemampuan kerja yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja sesuai dengan standar yang ditetapkan dan persyaratan di tempat kerja. Pendekatan ini bertujuan untuk membekali masyarakat dengan kemampuan yang relevan dengan kebutuhan industri dan lapangan kerja, sehingga mereka dapat bersaing di pasar kerja. Untuk menjamin pengendalian mutu pelatihan masyarakat, maka ditetapkan standarisasi, sertifikasi, dan akreditasi bagi penyelenggara pelatihan masyarakat. Sertifikasi merupakan pengakuan dan penghargaan kompetensi pada peserta yang dinyatakan lulus, sehingga mereka dapat memperoleh pengakuan formal atas kemampuan yang telah mereka miliki. Dengan demikian, standarisasi, sertifikasi, dan akreditasi dapat membantu meningkatkan kualitas pelatihan masyarakat dan memastikan bahwa peserta pelatihan memiliki kemampuan yang relevan dan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Adapun fenomena masalah yang terjadi adalah *pertama*, belum maksimalnya tindak lanjut pasca kegiatan pelatihan yang diadakan oleh pemerintah desa pada program pemberdayaan masyarakat disebabkan beberapa alasan seperti memiliki pekerjaan tetap, kesempatan kerja yang kurang, dan tidak yakin dalam mengambil risiko atau tidak tertarik memulai usaha. Pelatihan yang sudah diberikan tidak membuat masyarakat menjadi mandiri dan memajukan perekonomian yang ada didesa. *Kedua*, peserta pelatihan kurang mengerti atau memahami materi, sehingga ketika pelatihan ada yang berhenti mengikuti pelatihan dan tidak ada pemanfaatan pelatihan. *Ketiga*, Ada usaha tapi tidak bertahan lama dan sulit berkembang, karena daya beli memiliki permasalahan pemasaran yang sulit dilakukan oleh pelaku usaha, modal yang tidak mencukupi serta biaya bahan yang tidak terjangkau jadi kendala dalam usaha yang dijalankan.

Menurut Syaodih (2015:63) efektif adalah berkaitan dengan hasil dan manfaat dari proses pelaksanaan kegiatan. Suatu proses dinyatakan efektif jika kegiatan tersebut dapat memberikan hasil atau manfaat yang sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Menurut Charles dalam Anggono (2021:103) pengertian program adalah cara yang disahkan untuk mencapai tujuan.

Menurut Makmur (2015:228) pemberdayaan merupakan suatu usaha untuk menciptakan perubahan suatu keadaan lingkungan kehidupan manusia dengan menggunakan kemampuan dan kekuatan energi dalam rangka meraih tujuan kehidupan yang mereka cita-citakan sebelumnya.

Hasil penelitian terdahulu diantaranya “Efektivitas Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Matabu Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur”. Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas program pemberdayaan masyarakat Desa Matabu Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian menggunakan metode kualitatif-deskriptif, dengan teknik pengumpulan data yang dipakai adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sumber data diambil melalui penarikan sampel secara *snowball* berjumlah 13 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas program masih kurang efektif, hal ini terlihat dari: *Pertama*, keberhasilan program dapat dilihat pada indikator tujuan program kurang efektif, pada indikator perencanaan program kurang efektif. *Kedua*, keberhasilan sasaran dapat dilihat pada indikator ketepatan sasaran kurang efektif, pada indikator Standar Operasional Prosedur sudah efektif. *Ketiga*, tingkat *input* dan *output* antara efesien dan tidak efesien kurang efektif. *Keempat*, pencapaian tujuan menyeluruh dapat dilihat pada indikator strategi pencapaian tujuan program kurang efektif, pada indikator penilaian organisasi dalam melaksanakan tugas kurang efektif. Faktor-faktor yang mempengaruhi terbagi 2 yaitu faktor penghambat: *pertama*, perencanaan program yang belum efektif. *Kedua*, belum efektifnya hasil pelaksanaan program. *Ketiga*, tujuan program tidak terlaksana dengan optimal. Faktor pendukung: *pertama*, pelaksanaan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur.

Penelitian terdahulu , “Efektivitas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 12 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi Kasus Desa Batang Banyu dan Sungai Durian)”. STIA Amuntai. Tujuan penelitian ini mengetahui Efektivitas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 12 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi Kasus Desa Batang Banyu dan Sungai Durian) dan faktor-faktor mempengaruhinya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data diambil melalui informan berjumlah 18 orang *purposive sampling*. Hasil penelitian secara keseluruhan menunjukkan belum efektif, dilihat dari *Pertama* sub variabel pemahaman program sudah efektif desa Sei Durian dan Batang Banyu indikator sosialisasi, indikator pemahaman tujuan pemberdayaan sudah memahami tujuan dan indikator pemahaman terhadap materi peserta pelatihan bisa mempraktekkan seperti diajarkan. *Kedua*, sub variabel tepat sasaran sudah efektif dilihat indikator kesesuaian program pemberdayaan pelatihan diberikan sesuai potensi desa, indikator objek pemberdayaan pemerintah desa memilih langsung peserta pelatihan. *Ketiga*, sub variabel Tepat waktu belum efektif dilihat dua indikator yaitu indikator kesesuaian jadwal pemberdayaan beberapa pelatihan tidak sesuai jadwal dan indikator ketepatan implementasi rencana pemberdayaan ada beberapa pelaksanaan diadakan belum tepat. *Keempat*, sub variabel tercapainya tujuan belum efektif dilihat dua indikator meliputi indikator pencapaian tujuan belum bisa mengembangkan ilmu dan indikator keberlanjutan program masih sedikit keberlanjutan. *Kelima*, sub variabel perubahan nyata belum efektif dilihat indikator adanya perubahan, mendapatkan pekerjaan dan berusaha belum tercapai dan indikator adanya usaha berjalan belum efektif. Faktor pendukung diantara lain dari sarana dan prasarana sedangkan faktor penghambat dalam hal kurangnya motivasi masyarakat dalam melanjutkan pelatihan dan ketiadaan modal.

Efektivitas dapat diartikan sebagai suatu ukuran keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yang diukur dari hasil atau manfaat yang diperoleh. Sementara itu, program

merupakan suatu rencana yang sistematis dan terstruktur untuk mencapai tujuan tertentu. Program ini dirancang untuk mengorganisir dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan, sehingga tujuan dapat tercapai dengan lebih efektif. Dalam program, berbagai aspek yang perlu dijalankan atau dilaksanakan telah direncanakan dan diorganisir dengan baik, sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan lancar dan tujuan program dapat tercapai. Jadi, efektivitas suatu program dapat diukur dari sejauh mana program tersebut berhasil mencapai tujuannya, dan program yang efektif akan memberikan hasil yang optimal dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif-kualitatif yang bertujuan untuk mengeksplorasi dan menjelaskan subjek studi secara lebih mendalam dan komprehensif. Pendekatan kualitatif merupakan proses kerja yang sarannya terbatas, namun kedalaman datanya tidak terbatas. Teknik pengumpulan data kualitatif dalam penelitian ini antara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini, *purposive sampling* digunakan untuk mendapatkan sampel data dengan menentukan informan yang sesuai dengan kriteria yang diinginkan dengan jumlah informan sebanyak 13 orang. Teknik analisis data yang digunakan adalah pengumpulan data, reduksi data, dan penyajian data serta penarikan kesimpulan. Adapun uji kredibilitas data yang digunakan yaitu perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi, analisis kasus negatif, menggunakan bahan referensi dan mengadakan *membercheck*.

PEMBAHASAN

Berdasarkan teori yang relevan penelitian ini peneliti fokuskan pada teori dari Sutrisno dalam Rahayu *et.al* (2021) dengan penjelasan sebagai berikut.

Sub-variabel pemahaman program pada indikator sosialisasi adalah suatu proses pengenalan kepada publik agar mereka memahami maksud dan manfaat program melalui kegiatan pelatihan ini diadakan. Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dapat disimpulkan bahwa indikator sosialisasi belum efektif dilihat hanya sebagian masyarakat yang mengetahui adanya pelatihan serta tidak mengetahui tentang program yang dijalankan pemerintah yaitu program pemberdayaan untuk masyarakat karena pemerintah desa sebagai motivator perubahan bagi masyarakat masih kurang terbuka kepada masyarakat dalam setiap tahapan kegiatan pelatihan. Pada indikator pemahaman terhadap materi adalah hal yang penting untuk mengetahui mengetahui seberapa objek pemberdayaan paham materi atau penjelasan yang diberikan dalam kegiatan pelatihan. Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi disimpulkan bahwa indikator pemahaman terhadap materi belum efektif berdampak tidak adanya penerapan dikarenakan masih banyak yang tidak bisa mempraktekkan seperti yang diajarkan, ada yang berhenti dan sebagian masyarakat ada yang kesulitan menangkap materi karena faktor usia, materi yang diberikan beragam, waktu yang dikatakan belum cukup maksimal mendapatkan materi, memiliki pekerjaan, kapasitas masyarakat yang mengikuti pelatihan dan kesungguhan dalam mengikuti pelatihan. Pada indikator pemahaman

tujuan program pemberdayaan dimana mereka memahami apa tujuan dari suatu program pemberdayaan agar muncul motivasi, keinginan untuk mewujudkan atau sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa indikator pemahaman tujuan program sudah efektif dilihat dari masyarakat dan pemerintah desa sudah memahami tujuan dari pelatihan pada program pemberdayaan masyarakat meskipun pemahaman mereka berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya karena hanya mengandalkan pemahaman dari pengetahuan diri sendiri, namun dengan pemahaman terhadap tujuan yang baik tersebut bisa menjadi jalan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Sub-variabel tepat sasaran pada indikator kesesuaian program pemberdayaan adalah sesuainya pelatihan yang telah diberikan dengan program pemberdayaan masyarakat yang dijalankan, apakah pelatihan tersebut berguna untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan menciptakan kesejahteraan. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa indikator kesesuaian program pemberdayaan sudah efektif, dimana pelatihan-pelatihan yang diberikan memang sudah sesuai dengan aspirasi dan program pemberdayaan masyarakat yang dijalankan, yaitu memberikan kemampuan bagi masyarakat agar bisa hidup mandiri dan terberdaya lewat perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki untuk bisa dikembangkan. Pada indikator Objek pemberdayaan yang dimaksud adalah masyarakat yang mengikuti kegiatan pelatihan pada program pemberdayaan masyarakat, dimana peserta pelatihan setidaknya harus sesuai target pemberdayaan. Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dapat disimpulkan bahwa indikator objek pemberdayaan sudah efektif masyarakat yang mengikuti pelatihan rata-rata sudah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan sebelum diadakan pelatihan yang mana masyarakat yang mengikuti sudah tepat dengan target atau sasaran yang diinginkan, yaitu anak muda, pengangguran atau tidak memiliki pekerjaan, tidak dalam masa belajar atau sekolah dan lebih diutamakan dari anak keluarga kurang mampu, dan itu sudah sesuai dengan rencana target yang telah ditetapkan sebelumnya.

Sub-variabel tepat waktu pada indikator tepat pelaksanaan pada kegiatan pelatihan pada program pemberdayaan masyarakat sesuai dengan jadwal atau rencana yang telah ditetapkan sebelumnya, dikatakan tepat apabila waktu pelaksanaan tidak menemukan kendala hingga selesai. Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dapat disimpulkan bahwa waktu pelaksanaan pelatihan sudah tepat dan sesuai dengan apa yang direncanakan sebelumnya dan dapat dikatakan tepat pelaksanaan sudah efektif. Pada indikator tepat penyelesaian yaitu ketepatan waktu rencana penyelesaian pelatihan, waktu yang diberikan sudah sudah maksimal mendapatkan ilmu atau masih kurang, hal itu dikatakan tepat apabila waktu penyelesaian tidak menjadi permasalahan bagi peserta pelatihan untuk menyerap materi yang diberikan. Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dapat disimpulkan bahwa indikator tepat penyelesaian belum efektif, waktu penyelesaian yang direncanakan itu belum tepat dan belum maksimal untuk menyerap ilmu yang

diberikan, dengan waktu yang singkat dalam artian tidak memberikan waktu lebih panjang untuk mempelajari atau menguasai lebih dalam keahlian atau keterampilan yang perlu diberikan.

Sub-variabel tercapainya tujuan pada indikator pencapaian tujuan merupakan apa yang telah dicapai setelah kegiatan pelatihan dilaksanakan pada program pemberdayaan masyarakat yang bisa dilihat dari seberapa berhasilnya suatu hal tersebut mendekati tujuan yang diharapkan. Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dapat disimpulkan bahwa indikator pencapaian tujuan belum efektif dilihat dari tidak banyaknya pencapaian yang diraih peserta pelatihan untuk mencapai tujuan yang diinginkan sebelumnya, banyaknya masyarakat tidak menggunakan ilmu yang didapatkan untuk membuat usaha sehingga meningkatnya produktivitas dan daya saing hingga bisa mendapatkan pekerjaan dari keahlian yang didapatkan karena beberapa alasan seperti takut mengambil resiko dan ketiadaan bahan serta alat-alat. Pada indikator Keberlanjutan pelatihan adalah salah satu untuk melihat suatu hal tersebut telah efektif atau tidak, efektif adalah tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan tujuan yang direncanakan sebelumnya setelah pelatihan seperti meningkatkan perekonomian masyarakat maka ada keberlanjutan pelatihan. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dan dokumentasi dapat disimpulkan jika indikator keberlanjutan pelatihan belum efektif dikarenakan tidak ada keberlanjutan pelatihan serupa dan keberlanjutan masyarakatnya untuk mengembangkan keahlian dari pelatihan yang didapat masih sedikit.

Sub-variabel perubahan nyata pada indikator adanya perubahan yaitu tahap ini adanya perubahan dari masyarakat adalah dampak program melalui pelatihan yang dijalankan, apa yang dirasakan masyarakat terutama bagi yang mengikuti pelatihan tersebut. Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi bahwa indikator adanya perubahan belum efektif yang mana masyarakat dan pemerintah belum bisa merasakan perubahan nyata setelah pelatihan yang sesuai dengan tujuan diadakan pelatihan sebagian kecil dari banyaknya masyarakat yang telah dilatih dapat bekerja dan mencoba memulai usaha serta harapannya adanya BUMDes dan sejenisnya untuk memfasilitasi keahlian dan keterampilan mereka. Pada indikator meningkatnya kesejahteraan, bagian akhir dari bila adanya perubahan nyata dapat dilihat dari meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang mengikuti pelatihan. Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dapat disimpulkan bahwa indikator meningkatnya kesejahteraan itu belum efektif karena tidak ada peningkatan daerah kesejahteraan dari garis awal sebelum mengikuti pelatihan hingga sesudah mengikuti pelatihan.

Berdasarkan hasil penelitian, faktor utama yang mendukung pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat di Desa Bangkiling adalah ketersediaan anggaran yang memadai untuk operasional pelatihan. Pemerintah desa telah mengalokasikan dana khusus setiap tahunnya untuk membiayai berbagai komponen pelatihan, termasuk honorarium pelatih, pengadaan sarana dan prasarana, penyediaan alat-alat praktik, bahan-bahan pelatihan, serta konsumsi peserta. Hal ini terlihat dari testimoni berbagai pihak yang mengkonfirmasi bahwa tanpa ketersediaan dana, program pelatihan

tidak akan dapat terlaksana dengan baik. Fasilitas yang disediakan cukup lengkap sesuai dengan jenis pelatihan yang dilaksanakan, seperti mobil untuk pelatihan mengemudi, laptop dan alat penunjang untuk pelatihan servis HP, mesin jahit dan bahan-bahan untuk pelatihan menjahit, serta peralatan masak lengkap untuk pelatihan pembuatan aneka kue. Ketersediaan anggaran ini memungkinkan pemerintah desa untuk menyewa atau menyediakan tempat yang memadai, menghadirkan pelatih yang berkompeten di bidangnya, dan memastikan semua kebutuhan teknis pelatihan dapat terpenuhi, sehingga proses transfer pengetahuan dan keterampilan dapat berlangsung sesuai rencana meskipun masih terdapat kekurangan dalam aspek tindak lanjut pasca pelatihan.

Adapun faktor penghambat utama efektivitas program pemberdayaan masyarakat di Desa Bangkiling adalah rendahnya motivasi peserta dan ketiadaan modal usaha pasca pelatihan yang saling berinteraksi menciptakan lingkaran hambatan sistemik. Rendahnya motivasi peserta merupakan permasalahan kompleks yang bersumber dari minimnya sosialisasi komprehensif yang dilakukan pemerintah desa tentang tujuan strategis, manfaat jangka panjang, dan prospek pengembangan karir dari program pemberdayaan, sehingga masyarakat tidak memiliki pemahaman mendalam tentang esensi dan potensi transformatif dari pelatihan yang diikuti. Ketiadaan sosialisasi ini menyebabkan peserta cenderung mengikuti program tanpa kesungguhan dan komitmen yang tinggi, seringkali hanya karena ajakan atau bahkan paksaan dari aparat desa tanpa adanya motivasi intrinsik untuk mengembangkan diri. Konsekuensinya, banyak peserta yang tidak konsisten dalam kehadiran, menunjukkan sikap pasif selama proses pembelajaran, bahkan ada yang berhenti di tengah jalan karena tidak memiliki visi jelas tentang bagaimana keterampilan yang diperoleh dapat diintegrasikan dengan rencana hidup mereka. Ketakutan yang berlebihan untuk mengambil risiko dalam menerapkan ilmu yang didapat, terutama untuk membuka usaha baru atau mencari peluang kerja di bidang yang baru dipelajari, juga menjadi hambatan psikologis signifikan karena mayoritas masyarakat desa lebih nyaman dengan pola hidup tradisional dan pekerjaan yang sudah pasti seperti bertani, sehingga enggan keluar dari zona nyaman meskipun memiliki potensi untuk berkembang. Sementara itu, ketiadaan modal usaha menjadi kendala struktural yang paling krusial bagi peserta yang memiliki keinginan dan motivasi untuk menerapkan keterampilan yang diperoleh dalam bentuk usaha produktif. Setelah pelatihan berakhir, tidak ada bantuan sistematis berupa alat-alat kerja, bahan baku, atau dana stimulan yang dapat digunakan sebagai modal awal untuk memulai usaha, padahal sebagian besar peserta berasal dari keluarga kurang mampu yang tidak memiliki kemampuan finansial untuk menyediakan modal sendiri. Keterbatasan ekonomi ini diperparah oleh tidak adanya akses yang mudah dan terjangkau terhadap program permodalan alternatif seperti BUMDes atau program simpan pinjam yang seharusnya dapat menjadi jembatan finansial bagi masyarakat yang ingin mengembangkan usaha. Lebih lanjut, tidak adanya kemitraan strategis antara pemerintah desa dengan pihak swasta, koperasi, atau institusi lain untuk menciptakan jaringan pemasaran hasil produksi atau

penyerapan tenaga kerja terlatih, membuat peserta pelatihan tidak memiliki kepastian pasar dan peluang kerja yang jelas setelah menguasai keterampilan tertentu. Kombinasi faktor-faktor penghambat ini menciptakan situasi di mana peserta pelatihan tidak dapat mengimplementasikan dan mengoptimalkan keterampilan yang telah diperoleh dengan investasi sumber daya yang tidak sedikit, sehingga program pemberdayaan masyarakat tidak memberikan dampak nyata dan berkelanjutan terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat desa, melainkan hanya menjadi aktivitas rutinitas administratif yang tidak menghasilkan perubahan transformatif yang diharapkan.

SIMPULAN

Penelitian mengenai efektivitas program pemberdayaan masyarakat di Desa Bangkiling, Kecamatan Banua Lawas, Kabupaten Tabalong menunjukkan bahwa program belum berjalan efektif berdasarkan lima variabel evaluasi yang ditetapkan. Dari aspek pemahaman program, sosialisasi belum pernah dilaksanakan dan transfer materi pelatihan masih lemah karena peserta kurang memahami pembelajaran yang diberikan, meskipun pemahaman terhadap tujuan pemberdayaan sudah efektif. Ketepatan sasaran program telah sesuai dengan potensi desa dan kriteria peserta, namun ketepatan waktu pelaksanaan mengalami kendala dalam penyelesaian program karena waktu yang tersedia kurang maksimal untuk penyerapan ilmu. Pencapaian tujuan dan perubahan nyata belum terealisasi, terlihat dari minimnya aplikasi keterampilan pasca pelatihan, tidak adanya usaha berkelanjutan, dan tidak adanya peningkatan kesejahteraan yang signifikan. Faktor pendukung utama adalah ketersediaan dana yang memadai untuk operasional pelatihan, sedangkan faktor penghambat meliputi kurangnya motivasi peserta akibat tidak adanya sosialisasi, ketidakkonsistenan kehadiran, minimnya dukungan modal usaha, dan tidak adanya program tindak lanjut berkelanjutan. Temuan ini mengindikasikan perlunya perbaikan strategi implementasi program pemberdayaan masyarakat, terutama dalam aspek sosialisasi, optimalisasi waktu pelatihan, pendampingan pasca pelatihan, dan penyediaan akses modal usaha.

Berdasarkan temuan penelitian, pemerintah Desa Bangkiling perlu berkolaborasi dengan Badan Permusyawaratan Desa untuk melaksanakan sosialisasi yang komprehensif tentang tujuan dan manfaat program pemberdayaan masyarakat sebelum pelaksanaan pelatihan. Implementasi pendekatan pelatihan berbasis praktik dengan alokasi waktu yang optimal akan meningkatkan pemahaman peserta terhadap materi yang diberikan. Pengembangan sistem pendukung pasca pelatihan melalui penyediaan akses terhadap alat dan bahan kerja, pembangunan sistem pendampingan dan monitoring berkelanjutan, akses permodalan melalui BUMDes atau program simpan pinjam, serta kemitraan strategis untuk membuka akses pasar dan peluang kerja menjadi kunci keberhasilan implementasi keterampilan. Peserta pelatihan diharapkan dapat meningkatkan komitmen, konsistensi kehadiran, dan keaktifan dalam memberikan timbal balik terhadap program yang diikuti. Diperlukan kolaborasi multipihak dan pemantauan dari berbagai stakeholder untuk menciptakan ekosistem pemberdayaan masyarakat yang transparan, akuntabel, dan partisipatif, sehingga memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi dan pembangunan desa secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ambarwati, Arie. 2018. *Perilaku dan Teori Organisasi*. Cetakan Pertama. Malang: Media Nusa Creative.
- Anwar M Oos. 2019. *Pemberdayaan Masyarakat Era Global*. Edisi kedua. Alfabeta
- Affrian, R. and Jumaidi, J. (2025) 'Partisipasi Masyarakat Sebagai Penentu Efektivitas Kebijakan Kebersihan Pasar Di Amuntai Tengah', *Jurnal ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial*, 9(1), pp. 109–126.
- Hidayatullah, G.M. and Mahpuzah, A. (2025) 'Pengelolaan Pasar Mebel Muara Tapus pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Hulu Sungai Utara', *Administratus*, 9(2), pp. 26–33.
- Setiawan, I. (2025) 'Fenomena Penggunaan Sepeda Listrik di Kabupaten Hulu Sungai Utara', *Jurnal Niara*, 18(1), pp. 323–327.
- Mahmudi. 2019. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta.
- Masram & Muah. 2015. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Sidoarjo. Zifatama Publisher.
- Nasution, M. T., Munawarah, M., & Setiawan, I. (2022). *Efektivitas Program Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Matabu Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur*. Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai. *Jurnal MSDM Manajemen Sumber Daya Manusia*, 1(2), 148–154.
- Rahayu, N. S., Solihat, Y., & Priyanti, E. (2021). *Efektivitas Dinas Tata Ruang Dan Pemukiman Dalam Program Rehabilitas Rumah Tidak layak Huni Kabupaten Purwakarta (Studi Kasus Rumah Tidak Layak Huni di Desa Cibening Kabupaten Purwakarta)*. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*
- Shalihah, S., Gunade, D. T., & Fakhri, F. (2024). *Efektivitas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 12 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi Kasus Desa Batang Banyu Dan Desa Sei Durian)*. Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai. *Jurnal MSDM Manajemen Sumber Daya Manusia*, 2(1), 594–604.
- Wardiah, M. L. (2016). *Teori Perilaku dan budaya organisasi*. Bandung: Pustaka Setia.